



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

RENCANA KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA/RKT – SKPD)

T.A. 2023

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LANGKAT

STABAT
2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 dimana dijelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan kepala Kepala Daerah tentang RKPD ditetapkan dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang : Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya.

Rencana Kinerja ini dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat dalam rangka mencapai tujuan melalui proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan Strategis ini mengandung Visi, Misi, Tujuan, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Landasan Hukum penyusunan Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja Langkat Tahun 2022, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Dati II Langkat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahndun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 Tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2005 – 2025 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, lebih lanjut mengenai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya dengan Peraturan Bupati
18. Peraturan Bupati Langkat Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 7);

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Penyusunan Rencana Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat adalah :

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam perangkat daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

b. Tujuan penyusunan Rencana Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat adalah :

1. Menjabarkan rencana kerja strategis kedalam rencana operasional
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 secara prinsip dan isi mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penyusunan Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bab ini diuraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021) dan Capaian Renstra Tahun 2021, Analisis Kerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Isu-Isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd/Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Dan Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini diuraikan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini diuraikan Rencana Program Kegiatan OPD serta Pendanaannya.

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021) Dan Capaian Renstra Tahun 2021

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Kerja.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Kabupaten terdiri dari 3 (tiga) program dan 8 (delapan) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.532.150.303.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Pada tahun 2021 Realisasi pengeluaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Langkat sampai dengan Akhir Desember Tahun 2021 mencapai 90,70% atau Rp. 11.367.084.211,- dengan sisa anggaran Rp. 1.165.066.092,- terdiri dari :

- A. **BELANJA TIDAK LANGSUNG**, sebesar Rp. 6.695.575.209,-, yaitu :
 - Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp. . 6.695.575.209,-
- B. **BELANJA OPERASIONAL (BELANJA LANGSUNG)**, sebesar Rp. 5.836.575.094,-

Dan Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat yang dapat terealisasi sebanyak 3 program dan 8 kegiatan dengan capaian realisasi fisik sebesar 98,00% dan capaian realisasi keuangan Belanja Langsung sebesar 90,70%.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN anggaran Rp.6.695.575.209,- Realisasi Rp.6.414.077.960,- (95,80%)
- 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN anggaran Rp.51.960.000,- Realisasi Rp.49.530.000,- (95,32%)

B. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi anggaran Rp.130.000.000,- Realisasi Rp.128.190.000,- (98,61%)

C. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor anggaran Rp.35.579.943,- Realisasi Rp.32.571.348,-(91,54%)
- 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga anggaran Rp.8.082.069,- Realisasi Rp.7.874.169,- (97,43%)
- 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan anggaran Rp.36330.395,- Realisasi Rp.33.578.363,- (92,42%)
- 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan anggaran Rp.21.084.000,- Realisasi Rp.18.960.000,- (89,93%)
- 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran Rp.591.875.187,- Realisasi Rp.585.303.200,- (98,89%)

D. Pengadaab Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya anggaran Rp.26.636.000,- Realisasi Rp.26.636.000,- (100%)

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik anggaran Rp.52.800.000,- Realisasi Rp.34.669.990,- (65,66%)

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor anggaran Rp.92.950.000,- Realisasi Rp.80.200.000,-

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan anggaran Rp. 697.243.000,- realisasi Rp.671.043.181,- (96,24%)
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya anggaran Rp. 11.384.500,- realisasi Rp.9.200.000,- (80,81%)

PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

A. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota

1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan anggaran Rp.2.591.900.000,- realisasi Rp.1.786.500.000,- (68,93%)

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

A. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota

1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota anggaran Rp.1.488.750.000,- realisasi Rp.1.488.750.000,- (100%)

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Langkat

NO	Indikator (IKU , SPM, IKK)	Angka/ Nilai target/ standard (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra PD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1.	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3		N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Penegakan PERDA		N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		N/A	N/A	15	15	15	15	15	15	15	15	
4.	Nilai evaluasi implementasi AKIP		N/A	N/A	CC	B	B	BB	CC	B	B	B	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tingkat kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja masuk kategori sangat baik, hal ini dibuktikan dengan realisasi pencapaian kinerja persasaran yang menunjukkan hasil positif. Persentase pelanggaran Peraturan Daerah yang terselesaikan dan persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan di daerah telah mencapai target yang ditetapkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan. Adapun isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat berdasarkan telaah visi misi Kabupaten Langkat sebagai berikut :

1. Adanya Pelanggaran Perda dan Perbup yang dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan instansi
2. Masih minimnya Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran
3. Belum terpenuhinya pos PMK yang sesuai dalam WMK (Wilayah Management Kebakaran)
4. Meningkatnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
5. Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja belum sesuai kebutuhan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja, ada beberapa peruhan target setelah dilakukan analisis kebutuhan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal rencana kerja perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel berikut:

Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja T.A. 2023
Kabupaten Langkat Tahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	SATUAN	TARGET 2023 (Rp)	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	SATUAN	TARGET 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Kedinasan yang terlaksana	100	%	8,413,579,209	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Kedinasan yang terlaksana	100	%	8,413,579,209
	Tingkat realisasi Sasaran Kinerja ASN	100	%			Tingkat realisasi Sasaran Kinerja ASN	100	%	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	6,747,535,209	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	6,747,535,209
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	980	OB	6,695,575,209	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	980	OB	6,695,575,209
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	51,960,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	51,960,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	100,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	100,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	orang	100,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	orang	100,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	352,800,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	352,800,000

Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja T.A. 2023
Kabupaten Langkat Tahun 2023

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	80,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	80,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	25,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	25,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	paket	10,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	paket	10,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	15,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	15,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	Dokumen	22,800,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	Dokumen	22,800,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	200,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	200,000,000
Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	80,000,000	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	80,000,000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	unit	50,000,000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	unit	50,000,000
Pengadan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	unit	30,000,000	Pengadan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	unit	30,000,000

Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja T.A. 2023
Kabupaten Langkat Tahun 2023

Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	167,334,000	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	167,334,000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	67,800,000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	67,800,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	99,534,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	99,534,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	965,910,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	965,910,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	unit	100,910,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	unit	100,910,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	unit	750,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	unit	750,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	unit	15,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	unit	15,000,000

Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja T.A. 2023
Kabupaten Langkat Tahun 2023

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	100,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	100,000,000
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	100	%	2,797,136,650	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	100	%	2,797,136,650
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiba Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	%	2,377,797,550	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiba Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	%	2,377,797,550
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	60	Kasus	2,377,797,550	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	60	Kasus	2,377,797,550
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan Penegaka Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan eraturan Bupati/Wali Kota	100	%	419,339,100	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan Penegaka Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan eraturan Bupati/Wali Kota	100	%	419,339,100
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	80	Laporan	277,169,550	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan	80	Laporan	277,169,550

Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja T.A. 2023
Kabupaten Langkat Tahun 2023

	Bupati/Wali Kota					Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
Penanganan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	20	Laporan	142,169,550	Penanganan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	20	Laporan	142,169,550
PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase cakupan wilayah penanganan kebakaran	30	%	3,565,006,250	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase cakupan wilayah penanganan kebakaran	30	%	3,565,006,250
	Rata-rata waktu respon penanganan kejadian kebakaran	menit	15			Rata-rata waktu respon penanganan kejadian kebakaran	menit	15	
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	%	3,498,650,000	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	%	3,498,650,000
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	Laporan	1,498,650,000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	Laporan	1,498,650,000

Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja T.A. 2023
Kabupaten Langkat Tahun 2023

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1	unit	2,000,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1	unit	2,000,000,000
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Cakupan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100	%	16,813,350	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Cakupan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100	%	16,813,350
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem ProteksiKebakaran	24	Dokumen	16,813,350	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem ProteksiKebakaran	24	Dokumen	16,813,350
Investigasi Kejadian Kebakaran	Cakupan Investigasi Kejadian Kebakaran	100	%	17,413,350	Investigasi Kejadian Kebakaran	Cakupan Investigasi Kejadian Kebakaran	100	%	17,413,350
Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	20	Dokumen	17,413,350	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	20	Dokumen	17,413,350
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Cakupan Pemeberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100	%	32,129,550	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Cakupan Pemeberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100	%	32,129,550

Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja T.A. 2023
Kabupaten Langkat Tahun 2023

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	60	orang	17,129,550	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	60	orang	17,129,550
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	6	desa/kelurahan	15,000,000	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	6	desa/kelurahan	15,000,000

2.5.

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rancangan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja didiskusikan dalam pembahasan forum Internal PERANGKAT DAERAH dalam hal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH kabupaten di kecamatan.

Pada forum PERANGKAT DAERAH tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja selaku PERANGKAT DAERAH baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan PERANGKAT DAERAH kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) memuat 7 prioritas diantaranya Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, untuk mendukung prioritas nasional tersebut serta tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, disusunlah strategi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Langkat yaitu :

1. Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah
2. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Perlindungan masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun. Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya memperhatikan atau didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Selain itu, karena tujuan dimaksudkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi, maka tujuan organisasi harus dapat menunjukkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan aktivitas pelaksanaan misi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang, untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih masing-masing misi.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tujuan dan sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				Target					Satuan
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan menurunkan resiko kejadian bencana kebakaran		Cakupan wilayah penanganan ketentraman, ketertiban umum dan menurunkan resiko kejadian bencana kebakaran yang didukung sarana dan prasarana	4	4	4	4	5	Wilayah
		Meningkatnya pelayanan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3	n/a	100	100	100	100	persen
			Persentase Penegakan PERDA	n/a	100	100	100	100	persen
		Meningkatnya Pelayanan Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	n/a	15	15	15	15	menit
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi AKIP	C	CC	B	B	BB	nilai

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka disusunlah Rencana Program dan Kegiatan Indikatif sesuai dengan Rencana Kerja Direktorat Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta Manajemen Penanggulangan Bencana Kebakaran Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri dan RPJMD Kabupaten Langkat yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut

TABEL IV
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LANGKAT

KODE					BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	TARGET KINERJA	SATUAN	TARGET 2023 (Rp)	LOKASI
1					2	3	4	5	6	7	8
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Layanan Kedinasan yang terlaksana	100	%	8,413,579,209	SATPOL PP
						Tingkat realisasi Sasaran Kinerja ASN	100	%			
X	XX	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	6,747,535,209	SATPOL PP
X	XX	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	980	OB	6,695,575,209	SATPOL PP
X	XX	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	51,960,000	SATPOL PP
X	XX	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	100,000,000	SATPOL PP
X	XX	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	orang	100,000,000	SATPOL PP

Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja T.A. 2023
Kabupaten Langkat Tahun 2023

X	XX	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	352,800,000	SATPOL PP
X	XX	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	80,000,000	SATPOL PP
X	XX	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	25,000,000	SATPOL PP
X	XX	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	paket	10,000,000	SATPOL PP
X	XX	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	15,000,000	SATPOL PP
X	XX	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	22,800,000	SATPOL PP
X	XX	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	200,000,000	SATPOL PP
X	XX	01	207		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	80,000,000	SATPOL PP
X	XX	01	207	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	unit	50,000,000	SATPOL PP
X	XX	01	207	06	Pengadan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	unit	30,000,000	SATPOL PP
X	XX	01	208		Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	167,334,000	SATPOL PP
X	XX	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	67,800,000	SATPOL PP

Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja T.A. 2023
Kabupaten Langkat Tahun 2023

X	XX	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	99,534,000	SATPOL PP
X	XX	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	965,910,000	SATPOL PP
X	XX	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	unit	100,910,000	SATPOL PP
X	XX	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	unit	750,000,000	SATPOL PP
X	XX	01	209	03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	unit	15,000,000	SATPOL PP
X	XX	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	100,000,000	SATPOL PP
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	100	%	2,797,136,650	SATPOL PP

Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja T.A. 2023
Kabupaten Langkat Tahun 2023

1	05	02	201		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiba Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	%	2,377,797,550	SATPOL PP
1	05	02	201	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	60	Kasus	2,377,797,550	SATPOL PP
1	05	02	202		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Cakupan Penegaka Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan eraturan Bupati/Wali Kota	100	%	419,339,100	SATPOL PP
1	05	02	202	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	80	Laporan	277,169,550	SATPOL PP
1	05	02	202	03	Penanganan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	20	Laporan	142,169,550	SATPOL PP
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Persentase cakupan wilayah penanganan kebakaran	30	%	3,565,006,250	SATPOL PP
						Rata-rata waktu respon penanganan kejadian kebakaran	menit	15			

Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja T.A. 2023
Kabupaten Langkat Tahun 2023

1	05	04	201		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Penegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	%	3,498,650,000	SATPOL PP
1	05	04	201	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	Laporan	1,498,650,000	SATPOL PP
1	05	04	201	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1	unit	2,000,000,000	SATPOL PP
1	05	04	202		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Cakupan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100	%	16,813,350	SATPOL PP
1	05	04	202	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	24	Dokumen	16,813,350	SATPOL PP
1	05	04	203		Investigasi Kejadian Kebakaran		Cakupan Investigasi Kejadian Kebakaran	100	%	17,413,350	SATPOL PP
1	05	04	203	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	20	Dokumen	17,413,350	SATPOL PP

Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja T.A. 2023
Kabupaten Langkat Tahun 2023

1	05	04	204		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Cakupan Pemeberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100	%	32,129,550	SATPOL PP
1	05	04	204	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	60	orang	17,129,550	SATPOL PP
1	05	04	204	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	6	desa/kelurahan	15,000,000	SATPOL PP
JUMLAH										14,775,722,109	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja dan Rencana Kinerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat ditetapkan dengan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022 guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sebagai dasar untuk mencapai target kegiatan pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung sehingga nantinya seluruh program dan kegiatan berlangsung sehingga nantinya seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan dan transparansi, sehingga akan divisualisasikan dalam LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Langkat Tahun 2023.

Walaupun demikian dalam Penyusunan Rencana Kinerja ini, dimungkinkan banyaknya kekurangan-kekurangan namun diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diperoleh saran-saran perbaikan yang menambah sempurnanya perencanaan Pembangunan di Bidang Satuan Polisi Pamong Praja.